



# LAPORAN BARANG PENGGUNA

Kementerian  
Komunikasi  
dan Informatika

20  
24  
AUDITED

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





# LAPORAN BARANG PENGGUNA

KEMENTERIAN  
KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN 2024  
**AUDITED**

Periode Pelaporan Sampai dengan 31 Desember 2024

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

# Indonesia **Terkoneksi**

## Semakin Digital, Semakin Maju

Dalam kerangka prioritas pembangunan nasional, Kemenkominfo sebagai *focal point* pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional, menyadari bahwa infrastruktur digital Indonesia perlu dituntaskan lebih cepat, digitalisasi pada sektor ekonomi dan sektor pemerintahan juga perlu disegerakan, dan akselerasi kompetensi SDM talenta digital juga sudah mendesak. Mewujudkan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjalankan peran sebagai Pengguna Barang untuk mengoptimalkan seluruh sumberdaya Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.

Diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang dan bertanggungjawab untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) berdasarkan konsolidasi Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Barang Pengguna Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Laporan Barang Pengguna terdiri atas Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Pengguna mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI yang selanjutnya menjadi dasar dalam proses pelaporan Barang Pengguna pada Kementerian Kominfo.

Semoga Laporan ini memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara, serta juga memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2025  
Sekretaris Jenderal



Ismail

# PENDAHULUAN

## Laporan Barang Pengguna

Mewujudkan konsep *good governance*, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik merupakan salah satu tanggung jawab dalam pemenuhan keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara di dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga, serta berperan penting sebagai sarana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan berkelanjutan. Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) telah mengatur tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian Barang Milik Negara. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan atas perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Kementerian dan Lembaga Negara selaku Pengguna Barang agar menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna (LBP) secara periodik yang selanjutnya menjadi bagian dari Laporan Barang Milik Negara Pemerintah Pusat yang akan dikompilasi dan disusun oleh Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang Milik Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q. Sekretariat Jenderal sebagai salah satu Kementerian di dalam Pemerintahan juga harus menyusun Laporan Barang Pengguna Audited TA 2024 berdasarkan hasil konsolidasi Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBPE1) atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1).



## A. DASAR HUKUM

Sebagai bentuk tanggung jawab kredibilitas hukum, Laporan Barang Pengguna Audited TA 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika didasarkan dari beberapa regulasi pemerintah, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;



11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

## B. ENTITAS PELAPORAN

Pelaporan Barang Pengguna *Audited* tahun anggaran 2024 ini merupakan pelaporan atas entitas pelaporan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dulunya berdiri dengan nama Departemen Penerangan (Tahun 1945-1999) lalu berubah menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Tahun 2001-2005) dan kemudian berganti menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Tahun 2005-2009), lalu berganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Tahun 2009-2024), dan pada tahun 2024 menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki tugas utama untuk mengelola komunikasi dan transformasi digital, meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan media.

Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 62/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tanggal 14 Juli 2023 dan Keputusan Presiden RI Nomor 32/M Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju tanggal 14 Juli 2023 yang keduanya dilantik pada tanggal 17 Juli 2023, Menteri Komunikasi dan Informatika dijabat oleh Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dijabat oleh Nezar Patria terhitung mulai tanggal dilantik



Setelah Kabinet Merah Putih terbentuk, Kementerian Komunikasi dan Informatika berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital dijabat oleh Meutya Viada Hafid dengan Wakil Menteri Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.





**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

**UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tgl.Data : 07/05/25 7:37 AM  
 Tanggal : 07/05/25 1:08 PM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_kl\_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	8,675,892,566
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	169,371,601
117114	Suku Cadang	53,309,100
131111	Tanah	5,686,864,420,967
132111	Peralatan dan Mesin	19,221,826,932,568
133111	Gedung dan Bangunan	1,498,020,540,667
134111	Jalan dan Jembatan	15,472,782,576
134112	Irigasi	4,591,345,268
134113	Jaringan	23,726,667,043
135111	Aset Tetap Renovasi	105,275,727,978
135121	Aset Tetap Lainnya	11,238,611,623
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	3,948,093,888,979
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8,436,359,667,661)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(319,316,020,977)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(11,900,346,176)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(1,376,675,700)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(5,864,812,374)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2,315,775,366)
138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	13,770,252,510,858
138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	(3,294,374,926,610)
162151	Software	842,736,352,117
162161	Lisensi	461,044,347,328
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	102,909,605,776
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	784,201,236
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	26,469,933,379
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	28,414,353,773
166115	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	(134,271,759,054)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(22,551,328,352)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(546,996,703,559)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(189,802,435,480)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(27,721,353,773)
<b>J U M L A H</b>		<b>32,763,768,990,321</b>



**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - TINGKAT KL**  
**POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tanggal : 07/05/25 1:08 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_sawal\_kl\_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	7,204,600,600
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	191,904,831
117114	Suku Cadang	4,126,200
131111	Tanah	5,689,117,303,726
132111	Peralatan dan Mesin	14,751,026,130,274
133111	Gedung dan Bangunan	1,315,810,757,902
134111	Jalan dan Jembatan	13,425,413,575
134112	Irigasi	4,094,611,345
134113	Jaringan	31,494,114,545
135111	Aset Tetap Renovasi	35,047,351,872
135121	Aset Tetap Lainnya	10,812,311,114
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	6,806,355,802,389
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,420,502,030,127)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(261,921,245,666)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(10,566,789,473)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(1,164,238,527)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(5,318,981,807)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2,261,909,359)
138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	7,294,665,116,449
138131	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	6,420,756,058,925
138221	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	(2,302,414,348,994)
162151	Software	712,690,087,205
162161	Lisensi	461,015,562,015
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,227,400,913
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	258,745,833,907
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	10,296,610,518
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(250,699,267,534)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(522,736,470,922)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(146,980,952,463)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(9,282,024,351)
<b>J U M L A H</b>		<b>34,890,132,839,082</b>